

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi untuk menjadi negara yang maju. Dengan rentang geografis yang luas berupa kepulauan, kondisi sosial budaya yang beragam, dan jumlah penduduk yang besar, sangat berpengaruh terhadap proses pengalokasian pembangunan dan mekanisme pelaksanaan pemerintahan. Kondisi seperti ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah.

Dilihat dari data PDRB Kabupaten Ciamis menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2002 – 2005 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, diterapkannya sistem desentralisasi di Indonesia saat ini terbukti cukup efektif untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah karena setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Namun pada hakikatnya, daerah yang mempunyai batas wilayah yang luas tetap mengalami kesulitan dalam proses pemerataan pembangunannya. Oleh karena itu pemekaran daerah dirasa perlu dilakukan.

Pemekaran daerah adalah hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang pembentukan wilayah administratif baru di tingkat Provinsi, Kota dan

Kabupaten berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain, dan Daerah Otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai dengan perkembangan daerah. Pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Seiring dengan pesatnya permintaan pemekaran daerah yang terjadi, secara normatif Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ini menyebabkan banyak daerah di Indonesia yang mengusulkan diri untuk menjadi Daerah Otonom baru dengan tujuan mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam mengupayakan pembangunan dan kesejahteraan bagi daerahnya. Semangat otonomi daerah sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam Pasal (2) PP No. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.

Terdapat dua alasan yang menjadi latar belakang maraknya fenomena pemekaran wilayah di Indonesia, diantaranya :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan daerah induk sesuai dengan kebutuhan lokal.

2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Pemekaran daerah diasumsikan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal.

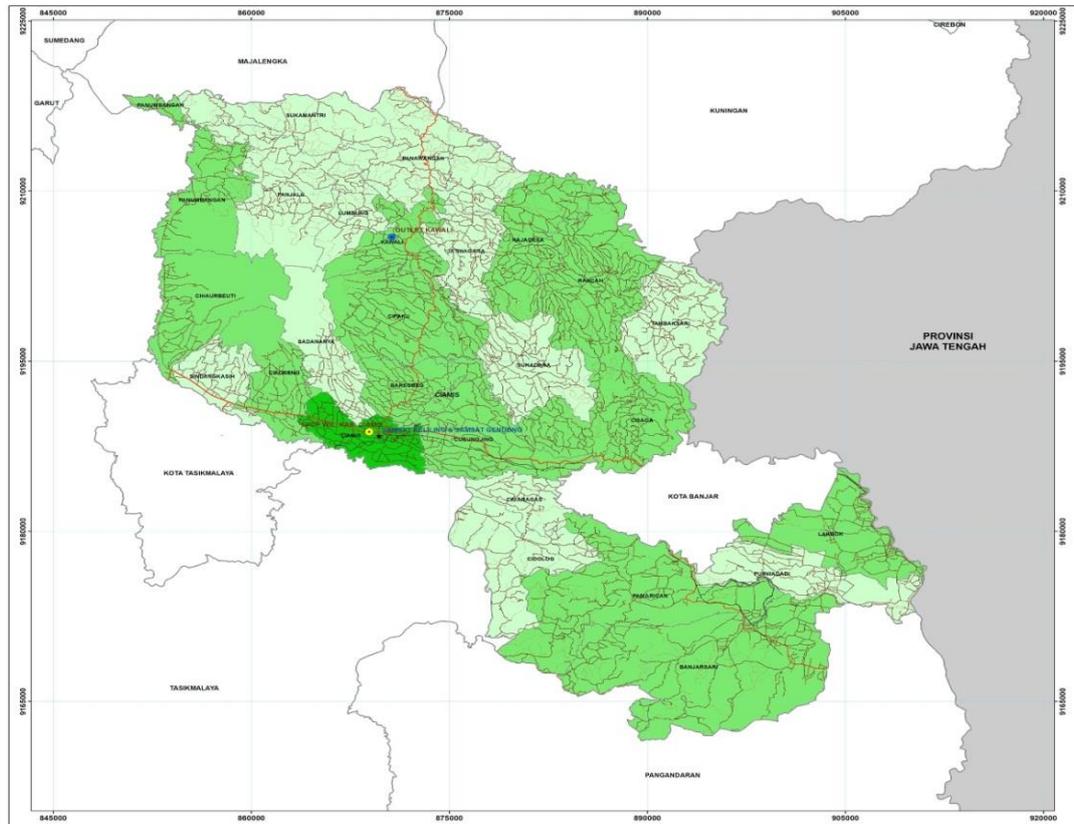
Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual.

Salah satu dampak dari adanya Undang-Undang tentang Daerah Otonomi baru juga dirasakan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Perkembangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Jawa Barat terhitung sejak tahun 1999 – 2019 telah menciptakan enam daerah otonomi baru, yaitu Kota Depok, Kota Tasikmlaya, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kabupaten Bandung Barat dan yang terakhir Kabupaten Pangandaran yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis pada tahun 2012. Dilihat dari daftar daerah otonomi baru di Provinsi Jawa Barat, yang paling menonjol adalah pemekaran

wilayah di Kabupaten Ciamis yang mana sampai saat ini terjadi dua kali pemekaran. Dimulai pada tahun 2002 yaitu pemekaran Kota Banjar dan disusul dengan pemekaran Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru tentu memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi kedua daerah baik daerah Otonomi Baru maupun daerah Otonomi yang terdahulu. Seperti yang saat ini dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Ciamis, dampak dari adanya pemekaran wilayah Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan di berbagai sektor.

Wilayah Kabupaten Ciamis sebelum adanya pemekaran Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012 memiliki luas sebesar 2.444,79 Km² yang terdiri dari 36 Kecamatan dan 351 Desa dan 7 Kelurahan. Kini, setelah wilayah Pangandaran resmi menjadi Daerah Otonomi Baru, luas wilayah Kabupaten Ciamis hanya sebesar 1.433,10 Km² dan terdiri dari 26 Kecamatan, 258 Desa dan 7 Kelurahan. Dengan kata lain, Kabupaten Ciamis melepaskan 10 Kecamatan dan 107 Desa untuk menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Pangandaran.



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Ciamis Setelah Pemekaran

Berkurangnya wilayah administratif Kabupaten Ciamis jelas berdampak pada berkurangnya potensi wisata yang ada. Seperti kita ketahui wilayah Pangandaran merupakan wilayah pesisir yang memiliki pesona pantai yang sangat indah. Luas wilayah pantai yang membentang sepanjang jalur selatan Parigi – Cimerak yang memiliki jarak ± 91 Km menyajikan berbagai panorama Indah. Namun, selain menyajikan objek wisata berupa pantai, di wilayah Pangandaran juga terdapat beberapa objek wisata alam lainnya yang tak kalah indah dengan wisata pantainya.. Tak heran jika wilayah Pangandaran merupakan salah satu ikon wisata di Kabupaten Ciamis yang menyumbangkan aliran dana cukup besar pada Penerimaan Asli Daerah

(PAD) di Kabupaten Ciamis. Dengan adanya Pemekaran wilayah Pangandaran otomatis pada saat ini Kabupaten Ciamis tidak memiliki wilayah Pesisir. Selan itu, lepasnya wilayah Pangandaran juga berdampak pada Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis. Berikut ini adalah tabel Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis enam tahun sebelum dan enam tahun sesudah pemekaran wilayah Pangandaran.

Tabel 1.1
PAD Sebelum Dan Sesudah Pemekaran

REALISASI PAD			
TAHUN	SEBELUM PEMEKARAN	SESUDAH PEMEKARAN	TAHUN
2007	54.711.929.114	117.475.935.245	2013
2008	46.847.498.084	182.320.228.014	2014
2009	51.343.657.098	180.304.950.790	2015
2010	50.512.875.953	204.795.434.820	2016
2011	58.900.535.511	222.938.975.240	2017
2012	87.711.885.423	234.610.670.215	2018

Selain berdampak pada Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan berkurangnya wilayah Kabupaten Ciamis, pemekaran wilayah Pangandaran juga berdampak pada sektor ekonomi lainnya. Laju pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut juga akan mengalami perubahan. Seperti kita ketahui, salah satu cara untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari data PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam kasus ini harga dasar yang digunakan sebagai acuan adalah harga dasar tahun 2010.

Tabel 1.2
PDRB Sebelum dan Sesudah Pemekaran

PDRB (Milyar Rupiah)			
TAHUN	SEBELUM PEMEKARAN	SESUDAH PEMEKARAN	TAHUN
2007	11.949	16.027	2013
2008	12.505	16.839	2014
2009	13.120	17.780	2015
2010	13.786	18.845	2016
2011	14.489	19.827	2017
2012	15.213	20.708	2018

Jika dilihat dari tabel di atas, PDRB Kabupaten Ciamis justru mengalami peningkatan setelah adanya pemekaran wilayah Pangandaran. PDRB Kabupaten Ciamis sebelum adanya pemekaran berada di kisaran angka 11 milyar – 15 milyar, namun setelah adanya pemekaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu berada di kisaran angka 16 milyar – 19 milyar. Jika dilihat dari fenomena tersebut, pemekaran wilayah Pangandaran berdampak positif bagi pertumbuhan PDRB di Kabupaten Ciamis.

Program pemekaran daerah juga berdampak langsung terhadap sektor pembangunan di daerah induk. Seperti yang kini terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, penataan objek wisata dan lain sebagainya saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Lepasnya wilayah Pangandaran dari wilayah Kabupaten Ciamis rupanya menambah semangat jajaran Pemerintahan di Kabupaten Ciamis untuk terus berbenah.

Dengan pesatnya pembangunan yang ada di Kabupaten Ciamis saat ini, jelas berdampak positif pada sektor-sektor sosial yang ada. Dilihat dari data yang tersedia di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, tingkat kemiskinan

di Kabupaten Ciamis saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Lepasnya wilayah Pangandaran dari Kabupaten Ciamis menyebabkan hilangnya sumber pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Ciamis berusaha menggali potensi-potensi lain sebagai pengganti pendapatan asli daerah yang hilang. Dalam proses optimalisasi potensi-potensi PAD tersebut, pemerintah tentu harus melakukan pembangunan di setiap sektor yang berpotensi menghasilkan PAD. Dalam proses proses pembangunan tersebut jelas akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja bisa menjadi salah satu indikator penurunan tingkat kemiskinan di suatu daerah, sama halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Ciamis saat ini.

Selain itu, dampak yang positif juga dirasakan di sektor pendidikan, salah satunya dilihat dari rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Jika dilihat dari rata-rata lama sekolah, siklusnya mengalami peningkatan yang berarti dari tahun ke tahun jenjang pendidikan yang pernah/sedang ditempuh oleh masyarakat di Kabupaten Ciamis semakin tinggi. Kemajuan di sektor pendidikan juga bisa dilihat dari indikator angka melek huruf. Angka melek huruf adalah tinggi rendahnya presentase penduduk yang melek huruf. Dari data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, angka melek huruf yang ada di Kabupaten Ciamis tiap

tahun siklusnya berfluktuasi namun tetap mengalami kemajuan yang artinya hampir seluruh penduduk di Kabupaten Ciamis melek huruf.

Selain berdampak pada sektor sosial dan ekonomi, pemekaran wilayah juga berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Ada beberapa indikator dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut, diantaranya dengan menggunakan rasio efektivitas PAD, rasio Efisiensi PAD, rasio kemandirian dan rasio keserasian. Oleh karena itu, pemekaran wilayah di Kabupaten Ciamis akan berdampak pula pada kinerja keuangan pemerintah daerah, karena dengan adanya pemekaran, aktivitas keuangan di Kabupaten Ciamis akan mengalami perubahan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk meneliti dampak dari Pemekaran Kabupaten Ciamis terhadap laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan dan kinerja keuangan pemerintah daerah serta memilih judul **“Analisis Dampak Pemekaran Kabupaten Ciamis Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi dan kinerja keuangan pemerintahan daerah sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana dampak dari pemekaran Kabupaten Ciamis terhadap aspek sosial pendidikan (Angka Melek Huruf)?
3. Bagaimana dampak dari pemekaran Kabupaten Ciamis terhadap kondisi ekonomi (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan tingkat Kemiskinan)?
4. Bagaimana dampak dari pemekaran Kabupaten Ciamis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Belanja Modal, Rasio Belanja Operasi dan Rasio Pertumbuhan)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi dan kinerja keuangan pemerintahan daerah sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui dampak dari pemekaran Kabupaten Ciamis terhadap aspek sosial pendidikan (Angka Melek Huruf).

3. Untuk mengetahui dampak dari pemekaran Kabupaten Ciamis terhadap kondisi ekonomi (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan tingkat Kemiskinan).
4. Untuk mengetahui dampak dari pemekaran Kabupaten Ciamis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Belanja Modal, Rasio Belanja Operasi dan Rasio Pertumbuhan).

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang lebih dalam lagi mengenai dampak dari Pemekaran Kabupaten Ciamis terhadap perkembangan sosial ekonomi.
2. Bagi pemerintah, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk terus berbenah agar dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Ciamis.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi guna penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Ciamis. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada data sekunder yaitu berupa publikasi laporan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan dan pendapatan asli daerah dari *website* resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini diawali sejak bulan Agustus 2019, diawali dengan pengajuan judul kepada pihak jurusan Ekonomi Pembangunan.

Tabel 1.3
Jadwal Kegiatan Penelitian

Keterangan	Tahun 2019																			
	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																				
Pengumpulan Data																				
Penyusunan UP dan Bimbingan Penelitian																				
Seminar Usulan Penelitian																				
Pengolahan Data																				
Penyusunan Skripsi dan Bimbingan																				
Ujian Skripsi dan Komprehensif																				